

## Peran Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Sikka

Frumensia Katensia<sup>1\*</sup>, Yosefina Andia Dekrita<sup>2</sup>, Imanuel Wellem<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Nipa, Indonesia

Korespondensi penulis : [tesikatensia@gmail.com](mailto:tesikatensia@gmail.com)

**Abstract :** *This study aims to find out the role of the Regional Research and Innovation Development Planning Agency in increasing the original regional income of Sikka Regency through collecting regional taxes in Sikka Regency. The problems faced during the last 2 years in the Regional Tax sector, namely targets and realizations from 2022 and 2023, are not significant. This is caused by several things, namely the lack of maximum attention from the planning side to increasing Original Regional Income from the tax sector, decreased awareness of taxpayers, decreased public awareness, lack of coordination, data base that has not been updated. The research method used is a qualitative method. Data collected through interviews and analyzed qualitatively. The results of this research show that BAPPERIDA has three main roles in increasing Original Regional Income through Regional Tax Collection, namely Planning, Coordinating and Evaluation Monitoring.*

**Keywords:** BAPPERIDA, Locally, Generated, Revenue, Regional Tax

**Abstrak :** Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka melalui pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Sikka. Permasalahan yang dihadapi selama 2 tahun terakhir pada sektor Pajak Daerah yaitu target dan realisasi dari tahun 2022 dan 2023 itu tidak signifikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu kurang maksimalnya perhatian dari sisi perencanaan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak, kemampuan kesadaran wajib pajak menurun, kesadaran masyarakat menurun, kurangnya koordinasi, data base yang belum di update. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Data yang dikumpulkan melalui hasil wawancara dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa BAPPERIDA memiliki tiga peran utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pemungutan Pajak Daerah yaitu Perencanaan, Pengoordinasian dan Monitoring Evaluasi.

**Kata Kunci:** BAPPERIDA, Pendapatan, Asli Daerah, Pajak Daerah

### 1. PENDAHULUAN

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka (BAPPERIDA) adalah salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah. Dalam proses kegiatan magang ini, penulis ditempatkan di bidang Perekonomian Sumber Daya Alam (PSDA). Bidang ini memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam menyusun, menyiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengatur, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi meliputi urusan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, keuangan, penanaman modal, tenaga kerja, pariwisata, lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, pangan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral. Dalam kegiatannya, bidang PSDA melaksanakan salah satu fungsinya yaitu

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang ekonomi. Dalam menjalankan fungsinya ini, Bidang PSDA melakukan pendataan potensi pajak daerah, kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah serta melakukan evaluasi secara rutin setiap tiga bulan sekali pada sejumlah Organisasi Pemerintah Daerah pengampu yang berada di Kabupaten Sikka.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah melalui pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah itu sendiri. PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah pasal 1 poin ke 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu sumber PAD adalah hasil pemungutan Pajak Daerah.

Pajak Daerah seperti yang dimuat dalam PERDA Sikka Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pasal 1 poin ke 1 menyatakan Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disebut Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak Daerah kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berikut tabel data total target dan realisasi Pajak Daerah Kabupaten Sikka dari tahun 2019-2023.

**Tabel 1. data total target dan realisasi Pajak Daerah Kabupaten Sikka dari tahun 2019-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%Pencapaian</b>
2019	20.559.987.600,00	21.530.813.226,80	104,72
2020	15.579.212.500,00	19.161.863.076,19	122,99
2021	18.283.917.400,00	19.494.028.872,90	106,61
2022	34.847.445.100,00	21.604.888.101,00	61,99
2023	35.847.445.100,00	24.139.671.880,74	67,34

*Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, 2025*

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa target dan realisasi pajak daerah Kabupaten Sikka mengalami ketidakstabilan atau fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2019 persentase pencapaian sebesar 104,72%, 2020 persentase pencapaian sebesar 122,99%, dan 2021 persentase pencapaian sebesar 106,61%. Keberhasilan

ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan pada tahun-tahun tersebut lebih realistis dan sesuai dengan kapasitas daerah untuk mengumpulkan pajak. Selain itu, pencapaian yang tinggi juga dapat disebabkan oleh efektivitas kebijakan pemungutan pajak, peningkatan partisipasi wajib pajak, dan adanya kondisi ekonomi yang mendukung selama periode tersebut. Tingginya realisasi dibanding target juga mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan memaksimalkan pendapatan daerah.

Keberhasilan pada periode 2019-2021 juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menjaga stabilitas dalam pengelolaan pajak meskipun dihadapkan pada tantangan pandemi COVID-19, terutama pada tahun 2020. Dengan pencapaian realisasi yang melampaui target, terlihat adanya pengelolaan yang baik dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pendapatan daerah, termasuk pemanfaatan teknologi dan peningkatan pengawasan.

Target pajak daerah Kabupaten Sikka pada tahun 2022 dan 2023 meningkat secara signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, target pajak mencapai Rp34.847.445.100,00, hampir dua kali lipat dari target tahun 2021 yang hanya Rp18.283.917.400,00. Peningkatan ini dilanjutkan pada tahun 2023 dengan target yang sedikit lebih tinggi, yaitu Rp35.847.445.100,00. Salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan kenaikan target ini adalah upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak. Hal ini kemungkinan terkait dengan rencana strategis daerah untuk meningkatkan pendapatan guna mendukung kebutuhan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program prioritas lainnya.

Namun, peningkatan target yang cukup drastis dalam dua tahun terakhir tampaknya tidak diimbangi dengan perencanaan dan pengelolaan yang efektif, sehingga realisasi pajak jauh di bawah target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara potensi yang diharapkan dan kemampuan daerah dalam mengumpulkan pajak secara optimal. Faktor-faktor seperti lemahnya manajemen pajak, kurangnya pemanfaatan teknologi dalam sistem perpajakan, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak bisa menjadi penyebabnya. Selain itu, situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih setelah pandemi COVID-19 juga turut memengaruhi daya beli dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya, sehingga memengaruhi pencapaian target.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Objek penelitian dibagi menjadi tiga yakni Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka, Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Sikka dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka.

## **Jenis Data**

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara peneliti kepada narasumber dari Jabatan Fungsional Pada bidang Perekonomian Sumber Daya Alam Bapperida Sikka. Data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait data target dan realisasi Pajak Daerah Kabupaten Sikka.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data primer dilakukan melalui instrumen wawancara. Bentuk wawancara yang akan dilakukan berupa wawancara semistruktur, di mana bentuk wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*. *In-depth interview* adalah metode pengumpulan data kualitatif yang dilakukan melalui wawancara langsung dan mendalam dengan narasumber. Tujuan utamanya adalah untuk menggali informasi secara rinci mengenai pengalaman, pandangan, opini, atau pengetahuan narasumber tentang suatu topik tertentu.

Pengumpulan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan permintaan data target dan realisasi Pajak Daerah Kabupaten Sikka kepada Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam. Studi pustaka ini ditujukan untuk memperoleh data sekunder yang memuat informasi tentang Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

## **Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Sikka merupakan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang perencanaan, bidang pembangunan riset dan inovasi daerah. Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPT menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka dipimpin oleh seorang

Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.

### **Peran utama Bapperida dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan Pajak Daerah**

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah memiliki tiga peran utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu Perencanaan, Pengoordinasian dan Monitoring Evaluasi. Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara bersama Jabatan Fungsional Perekonomian bidang Perekonomian Sumber Daya Alam (PSDA) yang membawahi bidang koordinasi Pendapatan Asli Daerah, BAPPERIDA turut mengambil peran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan Pajak Daerah sesuai cuplikan wawancara yang dilakukan, “Bapperida memiliki peran penting dalam proses pemungutan pajak. Peran BAPPERIDA fungsi utama itu dari sisi perencanaan, pengoordinasian serta monitoring dan evaluasi” .

Fungsi perencanaan, Bapperida bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang efektif untuk memaksimalkan potensi pajak daerah. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi sumber-sumber pajak yang dapat dikembangkan, merancang program pemungutan yang efisien, serta memastikan bahwa sistem administrasi perpajakan berjalan dengan baik. Dalam perencanaan pemungutan pajak, BAPPERIDA merancang sistem pemungutan yang efisien dan transparan untuk memastikan proses berjalan dengan optimal. Hal ini mencakup pengembangan atau peningkatan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi, seperti aplikasi pembayaran pajak online atau digitalisasi data wajib pajak. Tindakan nyata yang dilakukan adalah turut serta dalam pembahasan terkait regulasi tentang PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah), melakukan asistensi terhadap perangkat daerah pengampuh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Fungsi pengoordinasian, Bapperida berperan sebagai jembatan antar instansi terkait, seperti pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat, untuk memastikan strategi perpajakan dapat mendukung pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal. Selain itu, Bapperida juga bertugas mendorong keberlanjutan pembangunan daerah secara menyeluruh dengan mengoordinasikan berbagai sektor pajak daerah agar tercipta kebijakan yang harmonis dan terintegrasi dengan program pembangunan. Koordinasi antar instansi terkait dapat dilakukan melalui berbagai cara yang efektif, seperti komunikasi surat-menyurat untuk

menyampaikan informasi atau arahan secara formal dan terdokumentasi. Selain itu, kunjungan lapangan atau pengamatan langsung juga penting untuk memahami kondisi nyata di lapangan, sehingga dapat merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, mengadakan rapat koordinasi menjadi sarana strategis untuk menyatukan persepsi, membahas permasalahan, serta merumuskan solusi bersama yang melibatkan seluruh pihak terkait. Tindakan nyata yang dilakukan adalah melakukan koordinasi terhadap program kegiatan yang dilaksanakan.

Fungsi yang ketiga adalah monitoring dan evaluasi, di mana Bapperida melakukan pemantauan secara berkala terhadap penerimaan pajak daerah. Dalam proses evaluasi, Bapperida juga mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang muncul dalam proses pemungutan pajak. Proses ini dilaksanakan melalui pemantauan berkala dan peninjauan langsung ke lapangan untuk memastikan kelancaran serta efektivitas pemungutan pajak. Tindakan nyata yang dilakukan adalah melakukan monitoring tentang target pendapatan, realisasi dan kendala serta hambatan pemungutan pajak daerah. Monitoring dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

### **Strategi Bapperida dalam meningkatkan efektivitas pemungutan Pajak Daerah untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sikka**

Hasil Observasi dan wawancara dengan jafung perekonomian mengatakan “Strategi yang diusulkan seperti pembaharuan data base wajib pajak daerah, peningkatan sistem pemungutan melalui digitalisasi, melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya kewajiban membayar pajak, pendekatan pelayanan pembayaran (dibuat oleh BAPENDA) melalui aplikasi, qris dan dompet digital.”

Proses memperbarui dan memperbaiki data wajib pajak di tingkat daerah agar lebih akurat, lengkap, dan sesuai dengan kondisi terkini. Pembaharuan ini melibatkan pengecekan ulang informasi wajib pajak seperti identitas, alamat, jenis usaha, serta status kepemilikan aset yang relevan untuk penarikan pajak. Dengan database yang terbaru, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi wajib pajak dengan lebih tepat, meminimalkan potensi kesalahan dalam penagihan, serta mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Selain itu, pembaharuan ini memungkinkan pemerintah daerah menjalankan pengawasan yang lebih efektif dan mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik di kalangan masyarakat.

Peningkatan sistem pemungutan melalui digitalisasi merujuk pada upaya untuk memperbaiki proses pemungutan, baik itu pajak, retribusi, atau kontribusi lain, dengan memanfaatkan teknologi digital. Digitalisasi dalam sistem pemungutan bertujuan untuk membuat proses menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan, sehingga mengurangi potensi kesalahan dan kebocoran dana. Dengan sistem digital, masyarakat dapat melakukan pembayaran atau pelaporan dengan lebih mudah dan praktis melalui aplikasi atau platform online, tanpa perlu datang langsung ke kantor terkait. Selain itu, digitalisasi ini juga memudahkan pemerintah dalam melakukan monitoring secara real-time, sehingga dapat memperbaiki akuntabilitas dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dana.

Upaya penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang peran dan manfaat pajak dalam pembangunan. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat lebih memahami bahwa pajak yang mereka bayarkan akan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Dengan meningkatkan pemahaman ini, diharapkan muncul kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara tepat waktu. Sosialisasi bisa dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, media sosial, atau kampanye, dengan harapan masyarakat semakin sadar bahwa pajak adalah bagian penting dalam mendukung kemajuan negara.

Pendekatan pelayanan pembayaran yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) melalui aplikasi, QRIS, dan dompet digital merupakan langkah inovatif dalam meningkatkan efisiensi dan kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pembayaran. Dengan aplikasi yang dirancang khusus, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi terkait tagihan, pembayaran, dan fasilitas lainnya secara mudah hanya melalui perangkat seluler. Selain itu, penggunaan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) memungkinkan pembayaran dilakukan dengan cepat, aman, dan tanpa kontak fisik. Hal ini tidak hanya mempermudah masyarakat, tetapi juga mendukung digitalisasi transaksi yang sejalan dengan visi pemerintah dalam mendorong ekonomi berbasis teknologi.

Pemanfaatan dompet digital sebagai salah satu opsi pembayaran juga memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada masyarakat. Dengan integrasi ini, wajib pajak dapat memilih metode pembayaran yang paling sesuai dengan kebutuhannya, mulai dari transfer bank, saldo e-wallet, hingga pemindaian kode QR langsung. Pendekatan ini tidak hanya memperluas jangkauan layanan, tetapi juga mengurangi potensi keterlambatan pembayaran akibat proses yang rumit. Secara keseluruhan, inovasi ini menunjukkan komitmen BAPENDA

dalam memberikan pelayanan yang modern, transparan, dan ramah pengguna demi mendukung optimalisasi pendapatan daerah.

### **Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sikka**

“Selama 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2019 presentase pencapaiannya sebesar 104,72% , tahun 2020 presentase pencapaiannya sebesar 122,99%, tahun 2021 presentase pencapaiannya sebesar 106,61% kontibusinya besar, realisasinya melebihi target namun 2 tahun terakhir yaitu pada tahun 2022, 2023 menurun karena covid dan pertumbuhan ekonomi pendapatan ekonomi menurun.”

Selama tiga tahun berturut-turut, yaitu pada 2019, 2020, dan 2021, kontribusi pendapatan berhasil mencapai angka yang signifikan, bahkan realisasinya melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian dan aktivitas pengumpulan pendapatan berjalan cukup baik meskipun terdapat tantangan. Namun, dalam dua tahun terakhir, yaitu pada 2022 dan 2023, terjadi penurunan yang cukup signifikan. Penurunan ini terutama disebabkan oleh dampak berkepanjangan pandemi COVID-19 yang menghambat berbagai sektor ekonomi, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi yang memengaruhi pendapatan secara keseluruhan. Akibatnya, target yang sebelumnya tercapai dengan baik mulai sulit dipenuhi karena daya beli masyarakat melemah dan kegiatan bisnis mengalami penurunan tajam.

### **Koordinasi antara BAPPERIDA dan instansi lain dalam mengoptimisasi penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Sikka**

Berdasarkan hasil wawancara, Jafung Perekonomian mengatakan bahwa: “Membangun koordinasi dengan instansi seperti BAPENDA dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemungutan pajak, serta penindakan dan pemeliharaan data base wajib pajak.”

Menjalin kerja sama yang erat antara berbagai pihak terkait, khususnya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), dalam tahap perencanaan program atau kebijakan. Koordinasi ini penting untuk menyelaraskan tujuan, anggaran, dan strategi dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah atau mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Dengan melibatkan BAPENDA sejak perencanaan, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mempertimbangkan aspek pendapatan daerah, seperti pajak dan retribusi, serta menyesuaikan alokasi dana dengan kebutuhan daerah. Ini juga membantu dalam identifikasi potensi pendapatan baru, penghindaran tumpang tindih anggaran, serta optimalisasi penerimaan yang dapat memperkuat perekonomian lokal.

Pelaksanaan pemungutan pajak mencakup berbagai kegiatan mulai dari perencanaan, penetapan besaran pajak, hingga proses pembayaran oleh wajib pajak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pajak dikumpulkan sesuai aturan dan tepat waktu. Sementara itu, pengawasan pemungutan pajak bertujuan untuk memonitor dan mengevaluasi proses pengumpulan tersebut guna mencegah kecurangan, kebocoran, atau ketidaksesuaian lainnya. Pengawasan ini memastikan bahwa setiap tahapan pemungutan dilakukan dengan transparan dan akuntabel, sehingga dana pajak yang dikumpulkan benar-benar masuk ke kas negara dan dapat digunakan untuk pembangunan serta pelayanan publik sesuai peruntukannya.

Pelaksanaan pemungutan pajak mencakup berbagai kegiatan mulai dari perencanaan, penetapan besaran pajak, hingga proses pembayaran oleh wajib pajak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pajak dikumpulkan sesuai aturan dan tepat waktu. Sementara itu, pengawasan pemungutan pajak bertujuan untuk memonitor dan mengevaluasi proses pengumpulan tersebut guna mencegah kecurangan, kebocoran, atau ketidaksesuaian lainnya. Pengawasan ini memastikan bahwa setiap tahapan pemungutan dilakukan dengan transparan dan akuntabel, sehingga dana pajak yang dikumpulkan benar-benar masuk ke kas negara dan dapat digunakan untuk pembangunan serta pelayanan publik sesuai peruntukannya.

### **Faktor-faktor yang menyebabkan realisasi Pajak Daerah tidak mencapai target pada 2 tahun terakhir**

Jafung Perekonomian mengatakan bahwa “Faktor-faktor yang menyebabkan realisasi pajak daerah tidak mencapai target selama 2 tahun terakhir adalah covid, kemampuan kesadaran wajib pajak menurun, kesadaran masyarakat menurun, kurangnya koordinasi, data base yang belum di update, perhitungan target tidak sesuai dengan potensi yang ada (Pajak MBLBL).”

Pandemi COVID-19 tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga memberikan dampak besar pada berbagai sektor, termasuk ekonomi, pendidikan, dan sosial. Berbagai kebijakan seperti lockdown, pembatasan perjalanan, dan penutupan tempat usaha membuat banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan, sehingga mempengaruhi kestabilan ekonomi.

Di tengah pandemi COVID-19, kemampuan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya mengalami penurunan signifikan. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi dan penurunan pendapatan, yang membuat banyak wajib pajak lebih

fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar daripada kewajiban pajak. Akibatnya, pemerintah mengalami kesulitan dalam menghimpun pendapatan dari pajak, yang penting untuk mendukung berbagai program bantuan dan penanganan dampak pandemi. Banyak wajib pajak individu maupun badan usaha yang mengalami tekanan finansial, sehingga perhatian terhadap pelaporan dan pembayaran pajak menurun dibandingkan kondisi normal.

Pandemi juga berdampak pada penurunan kesadaran masyarakat terhadap berbagai aspek sosial dan kesehatan. Kebijakan pembatasan sosial dan situasi ekonomi yang sulit membuat masyarakat lebih cenderung fokus pada kebutuhan pribadi, sehingga kepedulian terhadap kepentingan bersama menurun. Misalnya, kepatuhan terhadap protokol kesehatan terkadang diabaikan, terutama ketika masyarakat merasakan kelelahan akibat pembatasan berkepanjangan. Selain itu, banyak individu yang mengalami stres dan kekhawatiran finansial, sehingga tingkat kesadaran terhadap isu-isu lain seperti kewajiban sosial, lingkungan, dan pajak menjadi kurang mendapat perhatian.

Kurangnya koordinasi dalam sebuah organisasi atau tim dapat menyebabkan terhambatnya aliran informasi, kebingungannya tujuan yang ingin dicapai, serta ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas. Ketika masing-masing pihak bekerja tanpa adanya komunikasi yang efektif, hal ini berpotensi untuk menciptakan kesalahpahaman dan memperlambat proses pengambilan keputusan. Koordinasi yang buruk juga bisa berakibat pada tumpang tindih pekerjaan atau kebijakan yang tidak sinkron, sehingga hasil yang dicapai tidak optimal.

Database yang belum diperbarui menjadi masalah serius karena data yang tidak akurat atau ketinggalan zaman dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang salah. Tanpa pembaruan rutin, informasi yang tersedia dalam sistem tidak mencerminkan kondisi terkini, sehingga mempengaruhi kualitas analisis dan prediksi yang dibutuhkan untuk perencanaan dan evaluasi. Ini juga bisa menghambat efisiensi operasional dan memengaruhi kemampuan organisasi untuk merespons perubahan dengan cepat.

Perhitungan target yang tidak sesuai dengan potensi yang ada dapat membuat organisasi atau individu menghadapi kesulitan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Target yang terlalu tinggi tanpa mempertimbangkan sumber daya yang tersedia atau potensi yang realistis akan memicu frustrasi, kelelahan, dan ketidakpuasan. Sebaliknya, target yang terlalu rendah dapat mengurangi motivasi dan menghambat kemajuan, karena tidak mendorong pencapaian

yang lebih besar. Oleh karena itu, penetapan target yang realistis dan sesuai dengan kapasitas sangat penting untuk memastikan keberhasilan jangka panjang.

### **Upaya atau solusi yang dilakukan BAPPERIDA untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

“Upaya atau solusi yang dilakukan adalah tingkatkan koordinasi sampai level aparat desa, mengalokasikan biaya operasional bagi pengelola PAD termasuk BAPENDA.”

Upaya koordinasi dan komunikasi dalam suatu program, kegiatan, atau kebijakan harus mencakup hingga aparat pemerintahan di tingkat desa. Artinya, semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah pusat, daerah, hingga pemerintah desa, perlu bekerja sama secara terintegrasi dan efektif. Koordinasi sampai level desa bertujuan untuk memastikan bahwa informasi, arahan, dan pelaksanaan program atau kebijakan tersebut benar-benar sampai dan dilaksanakan dengan baik hingga ke masyarakat di lapisan paling bawah. Dengan demikian, partisipasi aparat desa diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat setempat, mempercepat proses pelaksanaan di lapangan, serta memastikan bahwa program berjalan sesuai kebutuhan dan karakteristik lokal.

Kebijakan atau langkah untuk menyediakan anggaran khusus yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelola PAD biasanya mencakup berbagai lembaga atau instansi pemerintah yang bertugas mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, termasuk Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Dengan mengalokasikan biaya operasional, pemerintah memastikan bahwa BAPENDA dan lembaga pengelola PAD lainnya memiliki dukungan finansial untuk menjalankan tugas-tugas mereka. Dengan alokasi biaya operasional yang memadai, diharapkan kinerja pengelolaan PAD dapat meningkat, proses pengumpulan dan pengelolaan lebih efisien, serta pendapatan daerah dapat mencapai target yang diharapkan.

## **4. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) memiliki peran strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pemungutan pajak daerah, termasuk di Kabupaten Sikka. Berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Bapperida mengemban

tiga fungsi yang semuanya saling berkaitan dan mendukung pencapaian target penerimaan pajak daerah secara efektif yakni sebagai berikut:

1. Fungsi perencanaan, Bapperida bertanggung jawab menyusun strategi dan program yang terarah untuk memaksimalkan penerimaan pajak daerah. Perencanaan yang matang memungkinkan optimalisasi sumber daya, baik dalam aspek manusia, teknologi, maupun regulasi, sehingga memberikan dasar yang kuat bagi keberhasilan pengelolaan pajak daerah.
2. Fungsi pengoordinasian, dalam perannya Bapperida sebagai jembatan antar instansi yakni mengoordinasikan kebijakan perpajakan daerah agar selaras dengan program pembangunan daerah secara menyeluruh. Melalui komunikasi formal seperti surat-menyurat, rapat koordinasi, dan kunjungan lapangan, Bapperida memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya mendukung pencapaian target PAD, tetapi juga memberikan dampak positif bagi keberlanjutan pembangunan daerah.
3. Fungsi monitoring dan evaluasi, Bapperida melakukan pemantauan secara berkala terhadap penerimaan pajak, baik melalui pengumpulan data rutin maupun peninjauan langsung ke lapangan. Dalam proses evaluasi, tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak diidentifikasi secara sistematis, sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat. Fungsi ini tidak hanya membantu menjaga kelancaran proses pemungutan pajak, tetapi juga memberikan umpan balik yang berharga untuk perbaikan kebijakan dan strategi di masa depan.

## **Saran**

BAPPERIDA sudah menjalankan tiga peran yaitu perencanaan, pengoordinasian, serta monitoring dan evaluasi, namun untuk peran pengoordinasian sudah sejalan tetapi belum maksimal oleh karena itu di sarankan untuk lebih meningkatkan kembali koordinasi agar berjalan dengan maksimal dan juga khusus pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam harus menambah pegawai dalam bidang tersebut agar membantu dan memperlancar kegiatan dalam bidang tersebut salah satunya pajak daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfreda, A. A., & Goo, E. E. K. (2024). Analisis biaya operasional dan simpanan dalam memaksimalkan sisa hasil usaha pada KSP Kopdit Tuke Jung Nele. *Akuntansi* 45, 5(1), 30-43.
- Aquinaldo, T. N., Ghetta, A. P. K., & Juru, P. (2024). Analisis konsistensi perencanaan dan penganggaran serta implikasinya terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Sikka. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 3810-3814.
- Asmuruf, M. F., Rumate, V. A., & Kawung, G. M. V. (2015). Pengaruh pendapatan dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Sorong. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(05), 732.
- Atteng, A. G. K., Kalangi, J. B., & Sumual, J. I. (2019). Kontribusi realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkah Ilmiah Efisiensi*, 19(02), 97–107.
- Brigitte Lantaeda, S., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2002). Peran badan perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan RPJMD Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 04(048), 243.
- Bunga, F. M., Obon, W., & Meylano, N. H. (2024). The effect of emotional branding and experiential marketing on Chosik (Chocolate Sikka) purchasing decisions in Sikka Regency. *International Journal of Research in Social Science and Humanities (IJRSS)*, 5(8), 61-75.
- Bure, M. R., Wisang, I. V., & Juru, P. (2024). Kinerja pegawai ditinjau dari pengembangan karir dan motivasi kerja, studi kasus pada kantor badan perencanaan, penelitian dan pengembangan. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 6600-6606.
- Buu, A. L., Dekrita, Y. A., & Rangga, Y. D. P. (2024). Implementasi pemberian kredit usaha rakyat (KUR) pada KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat. *Jurnal Simki Economic*, 7(1), 156-167.
- Chuesta, R. N. B., Sanga, K. P., & Ghetta, A. P. (2024). Peran agency theory terkait manajemen risiko kredit dalam upaya meminimalisir kredit bermasalah pada KSP Kopdit Obor Mas Kanca Pasar Alok. *Budgeting: Journal of Business, Management and Accounting*, 5(2), 1354-1359.
- Da Rato, E. Y., Dekrita, Y. A., & Aek, K. R. (2024). Analisis perencanaan laba dengan penerapan titik impas pada Perumda Air Wair Pu'an Kabupaten Sikka. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 25(2).
- Da Silva, Y. O., Temu, T. J., & Lamawitak, P. L. (2024). Knowledge management-based efforts to improve MSME performance (Credit Union intervention for MSME actors in Sikka Regency). *Dinasti International Journal of Education Management and Social Science*, 5(4), 429-434.
- Daud, A., Dj, A. A., Adianita, H., & Mado, Y. J. (2024). The influence of participative leadership style on job satisfaction with organizational citizenship behavior as a

- moderating variable. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(4), 2192-2200.
- Dekrita, Y. A., & Goo, E. E. K. (2024). *Manajemen keuangan perusahaan teori & praktik*. Eureka Media Aksara.
- Dekrita, Y. A., Afrianti, M., Della, M. F. C., Devance, M. R., Seka, G. F., Nunuhitu, P. C., ... & Bunga, M. A. V. (2024). Pentingnya pengetahuan dan kesadaran pajak bagi UMKM dalam rangka menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Desa Bangkoor, Kecamatan TaliburA. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(5), 9942-9947.
- Elni, Y., Wellem, I., & Wulandari, C. A. (2024). Analisis proses pemberian pinjaman dalam mitigasi risiko kredit sebagai solusi kredit macet pada KSP Kopdit Pintu Air. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 3579-3585.
- Febronia, V., & Goo, E. E. K. (2024). Prosedur pengajuan dan realisasi kredit pada KSP Kopdit Hiro Heling Cabang Utama. *Ekonomika45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(2), 67-76.
- Florantino, A., Wellem, I., & Transilvanus, V. E. (2024). Efektifitas perencanaan penanganan dalam upaya percepatan pengentasan permukiman kumuh. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 563-568.
- Florida, M. I., Rengga, A., & Luju, E. (2024). Analisis anggaran kas dalam meningkatkan likuiditas pada KSP Kopdit Pintu Air Rotat Indonesia. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 5(2), 4358-4368.
- Goo, E. E. K. (2024). Pengaruh total assets turn over terhadap return on assets pada KSP Kopdit Pintu Air. *Akuntansi 45*, 5(1), 86-91.
- Gunawan, I., & Suebah, S. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Serang. *Journal Management Retail*, 02(1), 54-77.
- Hastuti, Y., Sanga, K. P., & Kurniawan, A. P. (2024). Implementasi sistem Daperma (PT. Pandai) pembayaran klaim asuransi dalam pelunasan hutang anggota meninggal dunia pada KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat. *Budgeting: Journal of Business, Management and Accounting*, 5(2), 1280-1290.
- Irwan Moridu. (2021). Efisiensi dan efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Banggai. *Jurnal Sinar Manajemen*, 8(2), 90-97. <https://doi.org/10.56338/jsm.v8i2.1643>.
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123 / M / KPT / 2019. Tentang magang industri dan pengakuan satuan kredit semester magang industri untuk program sarjana dan sarjana terapan.
- Lorang, M. H. D., Obon, W., & Yulianti, M. (2024). Peran badan perencanaan penelitian dan pengembangan (Bapelitbang) dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Sikka. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 3682-3686.

- Mado, Y. J., Irwansyah, R., Kasnowo, K., Irdhayanti, E., & Khairunnisa, K. (2024). The influence of organizational culture on service quality with compensation as a moderate variable. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(2), 1638-1648.
- Mafaza, M., Mayowan, Y., & Sasetiadi, T. H. (2019). Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah dalam pendapatan asli daerah (studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 11(1), 2.
- Maristela, T. N., Mitan, W., & Goo, E. E. K. (2024). Analisis strategi keunggulan bersaing usaha penjahit rumahan dengan pendekatan analisis SWOT: Studi kasus pada usaha jahit Ibu Mersi di Desa Habi. *Gemawisata: Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 20(2), 1-10.
- Mince, Y. (2021). Peran ganda perempuan pedagang dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor. 3(2), 17-28.
- Noeng, A. Y., & Nuwa, C. A. W. (2024). Pengaruh quality of work life dan beban kerja terhadap kinerja karyawan KSP Kopdit Pintu Air Cabang Maumere. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 25(2).
- Nuwa, C. A. W., Luju, E., Wisang, I. V., & Fatima, T. A. (2023). Pengaruh pengelolaan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Ilin Medo Kecamatan Waiblama. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(1), 705-713.
- Peraturan Bupati Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2017. Tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Sikka Inovation Centre pada Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan.
- Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2024. Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah.
- Prilosadoso, B. H., Salampessy, M., Yahya, A. S., Afrizal, D., & Mado, Y. J. (2024). Socialization of improving the quality of public services through digital-based integrated village governance in villages. *Journal of Human and Education (JAHE)*, 4(4), 1025-1030.
- Rikardus Weo, A. P. K., & Muda, V. A. (2022). Peran Bapelitbang dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. *Jurnal Projemen UNIPA*, 9(1), 1-6. <https://doi.org/10.59603/projemen.v9i1.202>.
- Rino, R. Y., Dekrita, Y. A., & Da Silva, Y. (2024). Peningkatan kapasitas perencanaan pada badan perencanaan dan penelitian dan pengembangan (Bapelitbang) dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sikka. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(3), 5637-5652.
- Rioni, Y. S., & Syauqi, T. R. (2020). Analisis peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pembuatan NPWP UMKM di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 28-37.
- Sunggu, Y. F. E., Wellem, I., & Tonce, Y. (2024). Peran Kelitbangan dalam mendukung pembangunan ekonomi desa berbasis kajian di Kabupaten Sikka. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 4165-4169.

- Subu, F. K., Rengga, A., & Juru, P. (2024). Analisis rasio keuangan profitabilitas untuk menilai kinerja KSP Kopdit Pintu Air tahun 2017–2021. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 5(2), 4230-4238.
- Sugo, Y. N., Kurniawan, A. P., & Muda, V. A. (2024). Peran BAPELITBANG dalam upaya peningkatan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Sikka. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 345-354.
- Titin, T., Dilliana, S. M., Tonce, Y., Tanur, E. A., & Winarti, T. (2024). Increasing village community knowledge through socialization of the waste independent village program. *Journal of Human and Education (JAHE)*, 4(2), 262-268.
- Valentino, G. R., Rengga, A., & Nuwa, C. A. W. (2024). Peran Bapelitbang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di tinjau dari retribusi parkir daerah di Kabupaten Sikka. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 4159-4164.
- Wela, P. R., Dekrita, Y. A., & Aek, K. R. (2024). Peran badan perencanaan dan penelitian dan pengembangan (Bapelitbang) dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Sikka melalui retribusi penjualan produk coklat Sikka pada unit pelaksana teknis Sikka Innovation Centre. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 3947-3951.
- Wisang, I. V., Transilvanus, V. E., & Mone, M. M. M. (2024). Pengaruh beban kerja dan stres kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor inspektorat Kabupaten Sikka. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(1), 82-88.
- Yacob, W., Dekrita, Y. A., & Mone, M. M. M. (2024). Peran rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Sikka dalam perencanaan pembangunan daerah. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 3952-3957.